

Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sistem Informasi Digital dan Promosi Potensi Wilayah

Riandy Samuel Sumolang^{1*}, Wenty Zahradi², Ardiensyah³

¹⁻³ Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

Korespondensi email: riandysamuelsumolang@gmail.com

Abstract. *The utilization of social media as a digital information system has become an essential aspect in supporting public services and promoting regional potential at the local government level. This study aims to evaluate the initiative of creating and managing the official social media account of the Tomohon Selatan District Office in disseminating public information and promoting tourist attractions, local culture, and community activities. The research was conducted using a descriptive qualitative approach through direct observation during an internship program. The findings indicate that social media plays a significant role in expanding the reach of information, enhancing interaction between the government and the community, and building a positive public image of the district. However, challenges such as limited digital infrastructure and lack of competent human resources in content management still need to be addressed. This study concludes that social media is a strategic tool to foster a more transparent, participatory, and adaptive local government in response to the advancement of information technology.*

Keywords: *social media; digital information; regional promotion; public service; sub-district government*

Abstrak. Pemanfaatan media sosial sebagai sistem informasi digital telah menjadi kebutuhan penting dalam menunjang pelayanan publik dan promosi potensi wilayah di tingkat pemerintahan lokal. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi inisiatif pembuatan dan pengelolaan akun media sosial resmi oleh Kantor Kecamatan Tomohon Selatan dalam menyampaikan informasi publik serta mempromosikan objek wisata, budaya lokal, dan kegiatan masyarakat. Penelitian dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode observasi langsung selama kegiatan magang. Hasil kajian menunjukkan bahwa media sosial berperan signifikan dalam memperluas jangkauan informasi, meningkatkan interaksi pemerintah dan masyarakat, serta membentuk citra positif kecamatan. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur digital dan kurangnya SDM yang kompeten dalam manajemen konten masih perlu diatasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial adalah sarana strategis untuk membangun pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Kata Kunci: media sosial; informasi digital; promosi wilayah; pelayanan publik; kecamatan

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat di era digital saat ini telah mengubah paradigma pelayanan publik, termasuk di lingkungan pemerintahan. Pemanfaatan media digital sebagai sarana penyampaian informasi telah menjadi kebutuhan mendasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan partisipatif. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi yang semakin relevan adalah penggunaan media sosial oleh instansi pemerintah sebagai alat komunikasi publik yang cepat, langsung, dan interaktif.

Kecamatan sebagai unit pemerintahan terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat memiliki tanggung jawab besar dalam penyampaian informasi dan layanan publik. Di sinilah pentingnya media sosial sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam menyampaikan informasi program kerja, layanan administrasi,

kegiatan masyarakat, serta promosi potensi lokal seperti objek wisata, produk unggulan daerah, dan budaya setempat.

Namun, berdasarkan hasil observasi di lapangan selama pelaksanaan kegiatan magang di Kantor Kecamatan Tomohon Selatan, ditemukan bahwa belum tersedia media digital resmi yang digunakan secara aktif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Informasi publik selama ini masih banyak disampaikan secara konvensional melalui papan pengumuman atau komunikasi verbal. Akibatnya, masyarakat tidak mendapatkan informasi secara cepat dan menyeluruh, dan hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap program-program pemerintah kecamatan.

Melihat kondisi tersebut, penulis mengambil inisiatif untuk membuat dan mengelola akun media sosial resmi Kantor Kecamatan Tomohon Selatan. Media sosial ini dirancang sebagai sistem informasi digital yang berfungsi untuk menyampaikan pengumuman pelayanan, dokumentasi kegiatan pemerintah, serta mempromosikan potensi wilayah kepada masyarakat luas. Selain untuk meningkatkan keterbukaan informasi, media sosial juga dimaksudkan sebagai sarana promosi yang murah, fleksibel, dan menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk generasi muda yang lebih akrab dengan platform digital.

Melalui pemanfaatan media sosial, diharapkan hubungan antara pemerintah kecamatan dan masyarakat menjadi lebih terbuka dan responsif. Informasi yang dulunya hanya dapat diakses di kantor kecamatan kini dapat diakses kapan pun dan di mana pun melalui perangkat digital. Inisiatif ini juga merupakan bentuk kontribusi nyata dalam mendukung implementasi e-government di tingkat lokal serta menjawab tantangan pemerintahan digital di era Revolusi Industri 4.0.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini disusun untuk menganalisis dan mengevaluasi pemanfaatan media sosial sebagai sistem informasi digital dan media promosi potensi wilayah oleh Kantor Kecamatan Tomohon Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi kecamatan lain dalam mengembangkan strategi komunikasi publik berbasis teknologi informasi.

Urgensi masalah

muncul dari kenyataan bahwa banyak kecamatan, termasuk Kantor Kecamatan Tomohon Selatan, belum secara optimal memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik. Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan magang, penyampaian informasi masih bersifat konvensional, seperti papan pengumuman dan komunikasi verbal. Hal ini berdampak pada keterlambatan informasi, rendahnya partisipasi masyarakat, dan

minimnya promosi potensi wilayah. Padahal, masyarakat saat ini telah bergeser ke pola konsumsi informasi yang digital dan mobile-oriented.

Tinjauan penelitian sebelumnya

menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial oleh instansi pemerintah telah banyak dikaji, seperti oleh Damayanti et al. (2023), Nasrullah (2015), dan Mergel (2013), yang menyimpulkan bahwa media sosial efektif dalam meningkatkan transparansi, partisipasi publik, dan promosi institusional. Namun, **kelemahan penelitian terdahulu** adalah kurangnya fokus pada implementasi nyata di tingkat kecamatan serta minimnya studi yang berbasis praktik langsung (field-based) seperti kegiatan magang. Sebagian besar penelitian bersifat observasional terhadap akun media sosial yang telah berjalan, bukan intervensi atau inisiasi dari nol.

Tujuan penelitian ini

adalah menganalisis pemanfaatan media sosial sebagai sistem informasi digital dalam pelayanan publik serta mengevaluasi efektivitasnya dalam promosi potensi wilayah di Kecamatan Tomohon Selatan. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi kendala dan merumuskan solusi pengelolaan media sosial di lingkungan pemerintahan kecamatan.

Kebaruan (novelty)

dari penelitian ini terletak pada pendekatan partisipatif melalui kegiatan magang yang menghasilkan inisiatif langsung berupa pembuatan dan pengelolaan akun media sosial resmi. Penelitian ini bukan sekadar evaluatif, melainkan juga implementatif—menyediakan contoh praktik nyata yang dapat direplikasi oleh instansi serupa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pemanfaatan media sosial dalam konteks pemerintahan lokal telah menjadi perhatian berbagai studi akademik, mengingat transformasi digital menuntut perubahan dalam sistem komunikasi birokrasi dan pelayanan publik. Media sosial tidak hanya menjadi ruang interaksi sosial informal, tetapi telah berevolusi menjadi platform strategis dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Tinjauan pustaka ini mengelaborasi teori dan temuan-temuan kunci dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema kajian ini.

Media Sosial sebagai Instrumen Transformasi Digital Pemerintahan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan fundamental dalam paradigma pelayanan publik. Media sosial, sebagai produk dari era Web 2.0, tidak hanya menjadi alat komunikasi pribadi, tetapi juga telah diadopsi oleh institusi

publik sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, membangun citra kelembagaan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pemerintahan. Nasrullah (2015) menyebut media sosial sebagai ruang publik digital yang bersifat partisipatif, horizontal, dan interaktif—karakteristik yang menjadikannya selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan modern.

Transformasi digital di sektor publik menuntut birokrasi untuk beradaptasi, tidak hanya dalam aspek teknologi, tetapi juga dalam perubahan pola kerja, budaya organisasi, serta cara pemerintah membangun relasi dengan masyarakat. Dalam konteks ini, media sosial menjadi katalis penting dalam membentuk pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif (Mergel, 2013). Pemerintah yang mampu memanfaatkan media sosial dengan baik akan memperoleh keunggulan dalam hal kecepatan penyampaian informasi, perluasan jangkauan audiens, serta peningkatan transparansi.

Efektivitas Media Sosial dalam Komunikasi Pemerintah

Banyak penelitian menunjukkan bahwa media sosial memberikan efektivitas tinggi dalam komunikasi pemerintahan. Studi oleh Damayanti et al. (2023) menunjukkan bahwa akun Instagram instansi pemerintah dapat membangun keterlibatan warga secara signifikan, terutama melalui penggunaan konten visual dan narasi yang komunikatif. Penelitian ini menyarankan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai papan pengumuman digital, tetapi juga sebagai sarana membentuk persepsi publik terhadap kinerja dan citra pemerintah.

Effing dan Spil (2016) memperkenalkan kerangka strategis pemanfaatan media sosial oleh pemerintah yang meliputi tiga komponen utama: **kehadiran digital (digital presence)**, **interaksi (engagement)**, dan **reputasi (reputation)**. Ketiganya harus dikelola secara konsisten untuk memastikan bahwa platform digital pemerintah bukan hanya aktif secara teknis, tetapi juga relevan secara sosial dan kultural.

Dalam konteks lokal, media sosial juga terbukti sebagai alat promosi wilayah yang efektif. Konten mengenai potensi wisata, produk lokal, dan kearifan budaya yang disebarluaskan melalui media sosial sering kali memiliki daya tarik tinggi bagi warga lokal maupun khalayak luas. Hal ini sejalan dengan temuan Tabrani et al. (2023) yang menyatakan bahwa platform digital dapat memperkuat identitas dan ekonomi lokal jika digunakan secara terarah.

Teori Adopsi Inovasi dalam Implementasi Teknologi Digital di Pemerintahan

Teori Adopsi Inovasi dari Rogers (2003) menjadi kerangka konseptual yang sangat relevan untuk memahami bagaimana media sosial diadopsi oleh lembaga pemerintahan. Teori ini menjelaskan bahwa adopsi teknologi oleh individu atau organisasi ditentukan oleh

lima karakteristik utama: **keunggulan relatif, kesesuaian dengan nilai dan kebutuhan, kompleksitas penggunaan, kemungkinan untuk diuji coba, dan kemudahan diamati hasilnya.**

Dalam praktiknya, media sosial memenuhi semua karakteristik ini. Media sosial dianggap lebih unggul dari metode komunikasi konvensional (seperti papan pengumuman), mudah digunakan oleh sebagian besar masyarakat, dapat dicoba dengan risiko rendah, dan hasilnya (misalnya, keterlibatan pengguna atau persebaran informasi) dapat segera diukur melalui fitur analitik yang tersedia di platform.

Namun, seperti dicatat Mergel (2013), keberhasilan adopsi media sosial tidak hanya tergantung pada teknologi itu sendiri, tetapi juga pada kesiapan organisasi. Faktor-faktor seperti kepemimpinan yang progresif, kompetensi SDM, dukungan regulasi internal, dan budaya organisasi sangat menentukan keberhasilan implementasi. Di tingkat kecamatan, tantangan seperti minimnya pelatihan digital, resistensi terhadap perubahan, dan keterbatasan infrastruktur menjadi kendala utama yang harus diatasi.

Media Sosial dalam Kerangka Good Governance

United Nations Development Programme (UNDP, 1997) menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) bertumpu pada prinsip **transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, dan responsivitas**. Media sosial, dalam konteks ini, memiliki peran strategis untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut. Komunikasi dua arah yang difasilitasi media sosial memungkinkan warga tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran secara langsung kepada pemerintah.

McQuail (2010) dalam *Mass Communication Theory* menggarisbawahi pentingnya **model komunikasi interaktif** yang menjadikan media sebagai penghubung dinamis antara institusi dan publik. Media sosial menjawab kebutuhan ini dengan fitur komentar, pesan langsung, polling, serta live streaming yang memungkinkan komunikasi real-time antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, penggunaan media sosial oleh instansi pemerintah dapat memperkuat akuntabilitas karena masyarakat dapat memantau kinerja dan berinteraksi secara langsung dengan pembuat kebijakan.

Namun, untuk mencapai fungsi optimal ini, media sosial pemerintah harus dikelola dengan profesional dan terstruktur. Tanpa pengelolaan konten yang baik dan tata kelola informasi yang bijak, media sosial justru dapat menimbulkan informasi yang bias, overload informasi, atau bahkan memunculkan potensi konflik digital.

Kesenjangan Penelitian dan Urgensi Studi Ini

Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada evaluasi media sosial pemerintah yang telah berjalan atau analisis konten yang diunggah oleh lembaga-lembaga besar di tingkat pusat atau provinsi. Sangat sedikit penelitian yang berbasis tindakan langsung (action-based research) di tingkat lokal seperti kecamatan, terutama yang dilakukan dalam konteks magang atau keterlibatan partisipatif dari pelaksana program. Oleh karena itu, studi ini memiliki posisi yang unik.

Penelitian ini tidak hanya mengamati, tetapi juga menginisiasi dan mengimplementasikan langsung penggunaan media sosial oleh Kantor Kecamatan Tomohon Selatan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengevaluasi proses secara komprehensif, mulai dari perancangan, pelaksanaan, hingga respons masyarakat. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi praktis berupa model penggunaan media sosial yang dapat direplikasi oleh instansi serupa dengan adaptasi lokal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai proses dan dampak pemanfaatan media sosial sebagai sistem informasi digital di Kantor Kecamatan Tomohon Selatan. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi fenomena sosial dan perilaku organisasi dalam konteks pelayanan publik.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian **deskriptif kualitatif**, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai proses, dinamika, dan dampak pemanfaatan media sosial sebagai sistem informasi digital dan sarana promosi potensi wilayah di lingkungan pemerintahan kecamatan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali fenomena sosial dan pengalaman langsung dari pelaksanaan program yang bersifat kontekstual dan kompleks.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan di **Kantor Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, Sulawesi Utara**, sebagai lokasi kegiatan magang sekaligus objek implementasi media sosial resmi kecamatan.

Subjek penelitian terdiri dari:

- Pegawai/staf Kantor Kecamatan Tomohon Selatan,
- Perangkat kelurahan,

- Tokoh masyarakat,
- Warga yang berinteraksi dengan media sosial kecamatan.

Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui beberapa teknik sebagai berikut:

- **Observasi Partisipatif:** Penulis terlibat langsung dalam aktivitas kantor kecamatan selama masa magang untuk mengamati pola komunikasi, penggunaan media, serta perubahan interaksi sebelum dan sesudah penggunaan media sosial.
- **Wawancara Tidak Terstruktur:** Dilakukan kepada pegawai kecamatan, perangkat kelurahan, dan masyarakat untuk menggali persepsi, respons, serta kendala dalam penggunaan media sosial.
- **Dokumentasi:** Mengumpulkan bukti fisik dan digital berupa tangkapan layar akun media sosial, statistik keterlibatan pengguna, serta arsip konten yang dipublikasikan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan **model analisis interaktif Miles dan Huberman (1994)** yang meliputi tiga tahap utama:

- **Reduksi data** – menyederhanakan dan memilih data yang relevan,
- **Penyajian data** – dalam bentuk naratif, tabel, dan visualisasi statistik keterlibatan pengguna,
- **Penarikan kesimpulan dan verifikasi** – dilakukan secara terus-menerus selama dan setelah pengumpulan data.

Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan-tahapan berikut:

- **Identifikasi Masalah:** Mengamati kondisi awal penyampaian informasi di kecamatan,
- **Perancangan Program:** Membuat akun media sosial dan merancang sistem manajemen konten,
- **Implementasi:** Mengelola media sosial selama periode magang,
- **Evaluasi:** Menganalisis efektivitas, respon masyarakat, dan tantangan dalam pelaksanaannya,
- **Refleksi dan Dokumentasi:** Menyusun laporan dan menyampaikan rekomendasi perbaikan.

Validitas Data

Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik **triangulasi sumber dan metode**, yaitu membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang konsisten dan akurat. Selain itu, dilakukan **member checking** dengan beberapa

informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman dan persepsi mereka. Keberadaan peneliti yang terlibat langsung di lapangan juga memperkuat validitas kontekstual data yang diperoleh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inisiatif pembuatan dan pengelolaan media sosial resmi oleh Kantor Kecamatan Tomohon Selatan memberikan dampak positif yang nyata terhadap efektivitas komunikasi publik dan promosi wilayah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek penting berikut:

Relevansi Kegiatan dengan Kebutuhan Instansi

Sebelum pelaksanaan magang, Kantor Kecamatan Tomohon Selatan belum memiliki akun media sosial aktif yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi publik. Informasi disampaikan secara manual melalui papan pengumuman atau dari mulut ke mulut. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan informasi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pemerintah. Dengan adanya media sosial, informasi seperti jadwal pelayanan, dokumentasi musyawarah, dan pengumuman penting kini dapat diakses masyarakat dengan cepat dan real-time.

Keterlibatan Aktif Selama Magang

Penulis tidak hanya berperan dalam perancangan dan manajemen akun media sosial, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan lain seperti pelayanan administrasi, musyawarah desa, serta dokumentasi kegiatan. Dalam proses pembuatan konten, penulis menjalin komunikasi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk memperoleh data dan narasi yang valid, sehingga konten yang diunggah tidak hanya informatif tetapi juga representatif.

Kualitas dan Kebermanfaatan Hasil Kerja

Media sosial yang dibuat menampilkan konten yang beragam, mulai dari pengumuman layanan publik, promosi objek wisata dan budaya lokal, hingga edukasi seputar administrasi pemerintahan. Penjadwalan konten dilakukan secara teratur dengan desain grafis menarik dan bahasa yang mudah dipahami. Statistik awal menunjukkan peningkatan jumlah pengikut, tayangan (views), dan interaksi (likes, komentar, dan direct messages). Hal ini membuktikan bahwa media sosial menjadi kanal yang efektif dan relevan bagi masyarakat lokal.

Tantangan Teknis dan Non-Teknis

Selama pelaksanaan magang, beberapa tantangan juga dihadapi. Tantangan teknis meliputi keterbatasan perangkat kerja seperti komputer dan jaringan internet yang kurang

stabil. Sementara itu, tantangan non-teknis berupa kurangnya literasi digital di kalangan pegawai kecamatan serta resistensi terhadap perubahan cara kerja konvensional menjadi digital. Untuk mengatasi hal ini, penulis melakukan pelatihan singkat kepada pegawai terkait dasar-dasar penggunaan media sosial dan pentingnya pengelolaan informasi publik secara profesional.

Pengembangan Kompetensi Diri

Kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi penulis, seperti keterampilan komunikasi birokrasi, manajemen konten digital, desain grafis, serta kemampuan analisis sosial. Pengalaman ini mengasah kepekaan sosial, kemampuan adaptasi, dan daya inovatif dalam menghadapi masalah nyata di lingkungan birokrasi lokal.

Landasan Teoritis

Temuan ini selaras dengan teori adopsi inovasi dari Rogers (2003), yang menekankan bahwa keberhasilan suatu inovasi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, dapat diuji coba, dan dapat diamati. Media sosial terbukti memenuhi kelima kriteria tersebut dalam konteks pelayanan publik. Selain itu, prinsip-prinsip Good Governance (UNDP, 1997) juga tercermin melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya alat bantu komunikasi, tetapi juga bagian integral dari strategi digitalisasi pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada masyarakat. Keberhasilan inisiatif ini dapat menjadi model percontohan yang layak direplikasi di kecamatan lain di seluruh Indonesia.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi selama pelaksanaan magang di Kantor Kecamatan Tomohon Selatan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan media sosial sebagai sistem informasi digital dan sarana promosi potensi wilayah terbukti efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan. Media sosial berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi secara cepat, transparan, dan interaktif.

Keberadaan akun media sosial resmi kecamatan telah mengatasi keterbatasan penyampaian informasi yang sebelumnya hanya mengandalkan metode konvensional. Kini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait pelayanan publik, agenda kegiatan pemerintahan, serta potensi wisata dan budaya lokal. Hal ini tidak hanya

meningkatkan efisiensi komunikasi, tetapi juga memperkuat citra positif kecamatan sebagai institusi yang modern, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan warganya.

Pembuatan dan pengelolaan media sosial oleh penulis juga menjadi media inovasi yang mendorong transformasi digital di lingkungan kerja kecamatan. Proses ini melibatkan analisis kebutuhan informasi, perancangan konten yang informatif dan menarik, serta evaluasi keterlibatan masyarakat secara daring. Upaya ini disambut positif oleh pihak kecamatan dan masyarakat, dibuktikan melalui peningkatan interaksi pengguna dan antusiasme terhadap konten-konten yang dipublikasikan.

Namun, keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi, baik dari segi teknis seperti keterbatasan perangkat dan infrastruktur digital, maupun tantangan non-teknis seperti minimnya literasi digital di kalangan pegawai. Oleh karena itu, untuk menjamin keberlanjutan sistem informasi digital ini, dibutuhkan strategi pendukung seperti pelatihan teknis, penunjukan petugas pengelola konten, serta penguatan infrastruktur dan kebijakan internal yang adaptif terhadap era digital.

Secara umum, media sosial terbukti sebagai sarana yang adaptif dan inklusif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi masyarakat. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan praktik baik bagi kecamatan lain dalam mengembangkan strategi komunikasi dan promosi wilayah berbasis digital. Dengan demikian, pemerintahan daerah dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0 dan mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13(1), 210–230.
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Damayanti, A., Delima, I. D., & Suseno, A. (2023). Pemanfaatan media sosial sebagai media informasi dan publikasi: Studi deskriptif kualitatif pada akun Instagram @rumahkimkotatangerang. *Jurnal Komunikasi dan Informasi Publik*, 6(1), 173–190.
- Jenkins, H. (2006). *Convergence culture: Where old and new media collide*. New York: NYU Press.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>

- Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P., & Silvestre, B. S. (2011). Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. *Business Horizons*, 54(3), 241–251.
- Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., Grant, I., & Kelly, K. (2009). *New media: A critical introduction* (2nd ed.). London: Routledge.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory* (6th ed.). London: Sage Publications.
- Mergel, I. (2013). Social media adoption and resulting tactics in the US federal government. *Government Information Quarterly*, 30(2), 123–130.
- Nasrullah, R. (2015). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Rheingold, H. (2000). *The virtual community: Homesteading on the electronic frontier* (Rev. ed.). Cambridge, MA: MIT Press.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). New York: Free Press.
- Shirky, C. (2008). *Here comes everybody: The power of organizing without organizations*. New York: Penguin Books.
- Tabrani, M., Prasetyo, F., Suhardi, & Nurrahman, D. (2023). Pemanfaatan media sosial sebagai platform informasi berbasis digital. *PRAWARA Jurnal ABDIMAS*, 2(4), 129–135.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. New York: UNDP.